



**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**  
*(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)*  
**Kota Yogyakarta**

# **LAPORAN KINERJA**

# **INSTANSI PEMERINTAH**



**(LKIP)**  
**2023**

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



**SERTIPIKAT**  
(TANDA BUKTI HAK)

**JL. Kenari No. 56 Yogyakarta (55165)**  
**dinpertaru@jogjakota.go.id**  
**0811-2735-100**

PERTANAHAN  
KOTA



# KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik.

LKIP ini merupakan bentuk **akuntabilitas** publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023 yang disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Tujuan penyusunan LKIP ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Akhir kata semoga LKIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.


Yogyakarta, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

(*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

Kota Yogyakarta



  
Wahyu Handoyo H.P., ST. MA., MTP.  
NIP. 19720411 199803 1 007

# IKHTISAR EKSEKUTIF

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 menyajikan capaian sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026. Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. **Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang**
  - a. Indikator kinerja: indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang
  - b. Formula indikator: (50% persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang ditambah 50% persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100
  - c. Capaian kinerja: terealisasi sebesar 87,23 dari target sebesar 84,84 atau tercapai sebesar 102,82%
2. **Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan**
  - a. Indikator kinerja: indeks tertib administrasi pertanahan
  - b. Formula indikator: (50% persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot ditambah 50% persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah) dikali 100
  - c. Capaian kinerja: terealisasi sebesar 93,74 dari target sebesar 92,73 atau tercapai sebesar 101,09%
3. **Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)**
  - a. Indikator kinerja: hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat
  - b. Formula indikator: kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat
  - c. Capaian kinerja: terealisasi sebesar 94,12 (AA) dari target nilai A (>80 - 90) atau tercapai sebesar 104,58%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta ke depan, diantaranya:

1. Percepatan penyusunan rancangan peraturan turunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta
2. Pengembangan sistem informasi tata ruang yang operasional dan mudah diakses

3. Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui pemberian layanan pemanfaatan ruang serta pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang
4. Pemenuhan kebutuhan tanah bagi pembangunan daerah dan kepentingan umum yang memenuhi kriteria prioritas pengadaan tanah dan '*value for money*'
5. Peningkatan pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjamin kepastian hukum atas status kepemilikan dan pemanfaatan tanah aset Pemkot Yogyakarta

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Struktur Organisasi.....	2
1.2. Tugas dan Fungsi.....	3
1.3. Isu-isu Strategis.....	3
1.4. Keadaan Pegawai.....	5
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	6
1.6. Keuangan.....	8
1.7. Sistematika LKIP.....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Perencanaan Strategis.....	10
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	10
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	11
2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan.....	12
2.2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	15
2.3. Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2023.....	17
2.3.1. Target Belanja Perangkat Daerah .....	17
2.3.2. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis.....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	21
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	27
3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	27
3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.....	28
3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/ Sejenis .....	28
3.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	29
3.2.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	31
3.2.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun	

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	32
3.2.7. Analisis Program/Kegiatan Terkait Pengarus utamaan Gender.....	36
3.2.8 Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja.....	36
3.2.9 Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja.....	39
3.3. Realisasi Anggaran.....	40
BAB IV PENUTUP.....	45
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2023...	5
Tabel 1.2	Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	6
Tabel 1.3	Daftar Inventaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2023.....	7
Tabel 2.1	Ringkasan Visi Misi Sasaran Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.....	10
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Jangka Menengah Tahun 2023-2026.....	12
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	12
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2023.....	16
Tabel 2.5	Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2023.....	16
Tabel 2.6	Target Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Perubahan Anggaran Tahun 2023	17
Tabel 2.7	Perubahan Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2023 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	17
Tabel 2.8	Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023.....	19
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	21
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2023.....	21
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang .....	22
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang .....	22
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan .....	24
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan .....	25
Tabel 3.7	Indikator dan Formula Indikator Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....	26
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....	26
Tabel 3.9	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya .....	27
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Kinerja Renstra 2023 - 2026.....	28
Tabel 3.11	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang se-DIY Tahun 2022.....	29
Tabel 3.12	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	31
Tabel 3.13	Realisasi Program Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang .....	32

Tabel 3.14	Realisasi Program Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan .....	34
Tabel 3.15	Realisasi Program Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan .....	35
Tabel 3.16	Realisasi Program Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....	36
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023.....	40
Tabel 3.18	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023.....	43



## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....	2
Gambar 3.1 Tampilan Laman dan Informasi Gatra Matra Jogja.....	38
Gambar 3.2 Inovasi Layanan Online Tahun 2023.....	39

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. LKIP Tahun 2023 disusun berdasarkan pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 menyajikan data capaian kinerja pada tahun 2023 yang merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026.

Dengan disusunnya LKIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini diharapkan dapat:

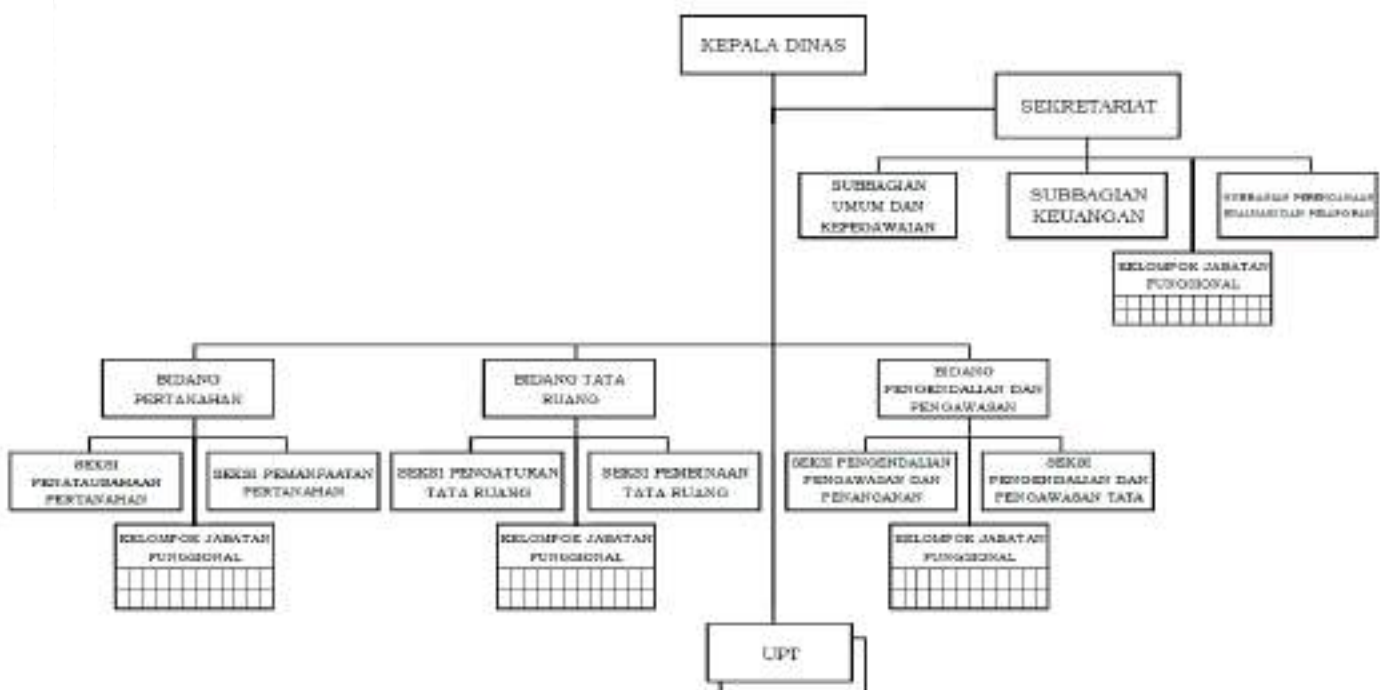
1. Memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.
2. Mendorong Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 1.1. Struktur Organisasi

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah, susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
- c. Bidang Pertanahan, terdiri atas:
  1. Seksi Penatausahaan Pertanahan
  2. Seksi Pemanfaatan Pertanahan
- d. Bidang Tata Ruang, terdiri atas:
  1. Seksi Pengaturan Tata Ruang
  2. Seksi Pembinaan Tata Ruang
- e. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan, terdiri atas:
  1. Seksi Pengendalian Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan
  2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang
- f. Unit Pelaksana Teknis



**Gambar 1.1**  
**Bagan Susunan Organisasi**  
**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)**

## 1.2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah, menetapkan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, tugas pembantuan, dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan bidang penataan ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan penataan ruang
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan dan penataan ruang
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan dan penataan ruang
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanahan dan penataan ruang
- e. Pelaksanaan penugasan keistimewaan di bidang pertanahan dan penataan ruang
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

## 1.3. Isu – Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Isu strategis yang melingkupi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, antara lain:

### a. Urusan Penataan Ruang

1. Penyusunan dan pengesahan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagai aturan yang lebih mendetailkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) pada kawasan-kawasan prioritas.
2. Peningkatan fungsi dan pelayanan terkait tata ruang dalam platform *online*.
3. Perlu adanya kelembagaan yang dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan tata ruang.
4. Pemenuhan target ruang terbuka hijau publik (RTHP) melalui upaya penambahan RTHP secara berkelanjutan maupun mempertahankan RTH privat minimal 10%
5. Peningkatan kualitas ruang publik perkotaan
6. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyediaan dan penerapan instrument pengendalian pemanfaatan ruang berupa insentif dan disinsentif maupun komprehensi pengendalian antara pemangku kepentingan atau Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang
7. Peningkatan penataan ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk mendukung tata ruang Keistimewaan

### b. Urusan Pertanahan

1. Pensertifikatan aset non jalan

Langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan ini adalah dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah-tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang belum bersertifikat untuk selanjutnya didaftarkan alas haknya ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Selain itu terhadap fasilitas umum seperti balai kampung, balai RW, gedung serbaguna, RTHP dan fasilitas umum sejenis lainnya akan dilakukan identifikasi, inventarisasi dan pendataan secara simultan. Dari hasil pendataan ini bagi yang memenuhi syarat akan dilakukan pendaftaran alas haknya.

2. Pensertifikatan jalan

Sesuai Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 71 tahun 2018 tentang penetapan ruas-ruas jalan di Kota Yogyakarta terdapat 490 ruas jalan yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta. Dari 490 ruas jalan tersebut hampir sebagian besar belum bersertifikat dan belum beralas hak. Untuk menjamin kepastian hukum baik dalam pemanfaatan maupun memperkecil potensi sengketa maka Pemerintah Kota Yogyakarta akan melaksanakan pensertifikatan ruas-ruas jalan tersebut secara bertahap yang sudah dimulai sejak tahun 2021. Hal ini penting dilakukan untuk memberi kepastian hukum bahwa dana APBD yang digunakan untuk pemeliharaan jalan benar-benar untuk aset Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara berkelanjutan.

Salah satu wujud perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengalokasian anggaran adalah belanja untuk pembelian tanah bagi kepentingan umum. Fasilitas umum yang akan dibiayai untuk pengadaan tanahnya adalah kantor pelayanan publik untuk kelurahan, kemandren, sekolah, puskesmas dan sejenisnya. Selain itu alokasi belanja tanah untuk kepentingan umum juga akan dialokasikan rutin untuk pengadaan RTHP. Hal ini sekaligus untuk memberikan kepastian bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta serius dalam mewujudkan target luasan RTHP sebesar 20% dari luas wilayah Kota Yogyakarta yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. Penyelesaian kasus sengketa tanah terkait tanah yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum

Jumlah kasus tanah terkait dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi ruang Kota Yogyakarta yang intensitasnya semakin tinggi sementara kebutuhan ruang publiknya juga semakin meningkat. Dari kasus yang sudah difasilitasi penanganan permasalahan/sengketanya mencapai 100% namun belum semua kasus sengketa tanah tersebut dapat selesai. Hal tersebut disebabkan oleh pihak-pihak yang bermasalah atau bersengketa sulit untuk bersepakat sehingga sampai saat ini masalah tersebut masih berproses.

5. Penatausahaan tanah Kasultanan dan Kadipaten

Pemerintah Kota Yogyakarta selalu mengambil peran aktif dalam penatausahaan tanah Kasultanan dan Kadipaten ini. Wujud peran aktif tersebut adalah melakukan identifikasi, inventarisasi, pendaftaran, pemanfaatan dan fasilitasi pemanfaatan oleh masyarakat terhadap tanah Kasultanan dan Kadipaten ini. Harapan ke depan dengan proses penatausahaan tanah Kasultanan dan Kadipaten ini akan membantu dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta turut andil dalam memfasilitasi pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten yang dimanfaatkan masyarakat. Dengan demikian tujuan akhir tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

#### 1.4. Keadaan Pegawai

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 31 orang PNS. Berdasarkan jenis kelamin, sebesar 64,52% atau sebanyak 20 pegawai berjenis kelamin perempuan, 10 orang diantaranya menduduki jabatan struktural. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen SDM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta telah memenuhi kesetaraan gender. Berdasarkan pendidikan, 41,93% (13 orang) berpendidikan S2, 35,48% (11 orang) berpendidikan S1, 12,91% (4 orang) berpendidikan D3, dan 9,68% (3 orang) berpendidikan SMA. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Data mengenai komposisi pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2023**

No	Jabatan	Rencana		Kondisi Eksisting				Keterisian Formasi
		Formasi		Formasi		Jenis Kelamin		
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Pria	Wanita	
<b>A</b>	<b>Jabatan Struktural</b>							
1	Kepala Dinas	1	S1, S2	1	S2	1		√
2	Sekretaris	1	S1, S2	1	S2		1	√
3	Kepala Bidang Pertanahan	1	S1, S2	1	S1	1		√
4	Kepala Bidang Tata Ruang	1	S1, S2	1	S2	1		√
5	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan	1	S1, S2	1	S2		1	√
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S1, S2	1	S1		1	√
7	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	S1, S2	1	S1		1	√
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	S1, S2	1	S2		1	√
9	Kepala Seksi Penatausahaan Pertanahan	1	S1, S2	1	S2		1	√

No	Jabatan	Rencana		Kondisi Eksisting				Keterisian Formasi
		Formasi		Formasi		Jenis Kelamin		
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Pria	Wanita	
10	Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan	1	S1, S2	1	S2		1	√
11	Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang	1	S1, S2	1	S2		1	√
12	Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang	1	S1, S2	1	S2	1		√
13	Kepala Seksi Pengendalian Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan	1	S1, S2	1	S2		1	√
14	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	1	S1, S2	1	S2		1	√
<b>B</b>	<b>Jabatan Fungsional Tertentu</b>							
15	Penata Ruang pertama	3	S1	3	S1	2	1	√
<b>C</b>	<b>Jabatan Fungsional Umum</b>							
16	Penelaah Teknis Kebijakan	15	S1/D4	7	S2	-	1	46,47%
					S2	1	-	
					S1	2	3	
17	Pengolah Data dan Informasi	20	D3	6	D3	-	4	30%
					SMA	1	-	
					SMA	1	-	
18	Pengadministrasi Perkantoran	6	SMA/D1	1	SMA		1	16,67%
	<b>Total</b>	<b>58</b>		<b>31</b>				

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2023**

No	Jabatan	Eselon				Golongan			Kualifikasi				Jenis Kelamin	
		II	III	IV	Staff	IV	III	II	S2	S1	D3	SMA/SMK	P	W
	<b>PNS</b>													
1	Jumlah	1	4	9	17	9	17	5	13	11	4	3	11	20
2	%	3,03	12,12	27,27	57,27	33,33	51,52	15,15	41,93	35,48	12,91	9,68	42,42	64,52

Jumlah pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada tahun 2023 baru terpenuhi 53,45% dari kebutuhan yang ada. Kekosongan pegawai terdapat pada jabatan fungsional umum yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan. Untuk mengatasi persoalan keterbatasan pegawai tersebut dilakukan kebijakan optimalisasi tugas/fungsi pada SDM yang ada dan penambahan SDM melalui penyediaan jasa lainnya orang perseorangan.

### 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta telah didukung dengan sarana dan prasarana yang mencukupi. Prasarana ruang yang tersedia meliputi ruang rapat, ruang arsip dan perpustakaan, musholla, ruang laktasi, gudang, dan toilet. Sejalan dengan usia kerjanya, diperlukan pemeliharaan ataupun penambahan sarana prasarana yang terukur. Data

sarana dan prasarana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Daftar Inventaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2023**

No	Jenis	Jumlah (Unit)
1	Kendaraan roda empat	5
2	Kendaraan roda dua	12
3	Sepeda	2
4	Roll meter	2
5	Kalkulator	2
6	Almari	7
7	Rak arsip besi	13
8	Rak arsip kayu	5
9.	Filling cabinet	15
10	Brand kas	2
11	Almari lerek	5
12	Wireless Hotspot	1
13	Almari arsip kayu	5
14	Kursi tamu /zice	3
15	Meja rapat	38
16	Meja telepon	9
17	Meja knap	3
18	Kursi rapat	77
19	Kursi putar	60
20	Kursi lipat	74
21	Meja komputer	2
22	Meja Counter	1
23	Jam dinding	16
24	AC	12
25	Vacum cleaner	1
26	Kipas Angin	4
27	Wireless	3
28	UPS	18
29	Dispenser	6
30	Komputer	40
31	Note book	13
32	Printer	30
33	Harddisk Eksternal	10
34	Scanner	9
35	LCD Proyektor	3
36	Handycam	2
37	Meja kerja biro	12
38	Kamera digital	4
39	Digital Voice Recorder	1



No	Jenis	Jumlah (Unit)
40	LED TV 32"	6
41	Telepon langsung	1
42	Telepon internal	4
43	Meja Kubical	45
44	Almari Es	1
45	HT	2
46	Gedung	1
47	Gudang	1
48	Pompa Air	1
49	Jet Cliner	1
50	Meteran ukur	2
51	Meteran digital	4
52	Sketmat digital	2
53	Kardekbesi	1
54	Papan nama instansi	1
55	Backdrop Papan Nama Instansi	1
56	Almari display kaca	2
57	Almari Kaca	5
58	Kamera video digital	2
59	Buku	125

## 1.6. Keuangan

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada tahun 2023 berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebesar Rp. 11.692.612.900,- (Sebelas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 9.819.137.950,- (Sembilan milyar delapan ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 5.012.336.000,- (Lima milyar dua belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 4.806.801.950,- (Empat milyar delapan ratus enam juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), serta belanja modal sebesar Rp. 1.873.474.950,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan dalam upaya pencapaian kinerja.

## 1.7. Sistematika LKIP

Sistematika penulisan LKIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini disajikan ringkasan capaian kinerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta serta tantangan pencapaian sasaran ke depan

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Penjelasan umum Organisasi : Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas, Isu Strategis; Keadaan Sumber daya: Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan; dan Sistematisa LKIP

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini berisi Perencanaan Strategis: Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi, Program dan Kegiatan; Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023; dan Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2023: Target Belanja Perangkat Daerah dan Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini berisi uraian Capaian Kinerja Organisasi 2023: Capaian Kinerja Tahun 2023, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis permasalahan yang dihadapi, analisis program/kegiatan, analisis program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja. Disajikan pula Realisasi Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja TA 2023

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi Kesimpulan, Rencana Tindak Lanjut, dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja

## **LAMPIRAN**

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Strategis

Renstra adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahunan. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta yang mengacu pada tugas dan fungsinya yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta merupakan manifestasi komitmen Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 dan pemenuhan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025.

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 ditetapkan melalui Peraturan Walikota No. 35 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026. Dalam rangka perbaikan kinerja, pada tahun 2023 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melakukan reuiu Renstra yang meliputi penyesuaian formula dan metadata pada indikator kinerja sasaran serta penyesuaian indikator, formula, dan metadata kinerja program yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta No. 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

#### 2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan misi Kepala Daerah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Visi Misi dan Sasaran Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026**

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan	1. Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
	2. Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan	2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata
	3. Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam	3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Visi	Misi	Sasaran Daerah
	Pelayanan Jasa	4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat
	4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan	5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya	7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
	6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum	8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
	7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai	9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
	8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas	10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
	9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat	11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta mendukung sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu **“Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang”** dan **“Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan”** dengan indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah.

### 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Mengacu pada visi, misi, dan sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada tahun 2023 – 2026 yaitu:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang
2. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan
3. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

Sasaran perangkat daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada tahun 2023 – 2026 dijabarkan pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Strategis Jangka Menengah Tahun 2023 – 2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahunan			
			2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Tata Ruang	84,84%	89,63%	93,47%	97,32%
2	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Indeks tertib administrasi pertanahan	92,73%	93,02%	93,31%	93,60%
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> )	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A

### 2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, pada tahun 2023 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan 7 program, 18 kegiatan, dan 55 subkegiatan sebagaimana disajikan pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2023**

No	Sasaran	Program	kegiatan	Subkegiatan
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan Ruang	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	1. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
				3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
			4. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
3			3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
			6. Sistem Informasi Penataan Ruang	
4			4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang

No	Sasaran	Program	kegiatan	Subkegiatan
			Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	8. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
				9. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
2	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah	5. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	10. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	6. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	11. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		3. Program Pengelolaan Tanah Kosong	7. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	12. Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
		4. Program Penatagunaan Tanah	8. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/kota	13. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
		5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	9. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	14. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
			10. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	15. Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
				16. Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
				17. Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> )	6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				19. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				20. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				21. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				22. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
				23. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No	Sasaran	Program	kegiatan	Subkegiatan
				24. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			12. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				26. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				27. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				28. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				29. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				30. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
				31. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				32. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			13. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				34. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				35. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
				36. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				37. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				38. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
			14. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			15. Administrasi Umum Perangkat Daerah	40. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				41. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				42. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				43. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

No	Sasaran	Program	kegiatan	Subkegiatan
				44. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				45. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			16. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46. Pengadaan Mebel
				47. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			17. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				49. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				50. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			18. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				52. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				53. Pemeliharaan Mebel
				54. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				55. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## 2.2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah kepada pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan sasaran perangkat daerah yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja harus memperhatikan Renstra, indikator sasaran atau indikator kinerja utama, dan dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran perangkat daerah. Perjanjian kinerja dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tahun 2023, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan perubahan perjanjian kinerja terkait adanya perubahan target kinerja dan anggaran. Perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 disajikan pada tabel 2.4 dan tabel 2.5.



**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang	82,33
2	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Indeks tertib administrasi pertanahan	93,91
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> )	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	91

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 1.815.946.000	APBD TA 2023
2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 248.507.000	APBD TA 2023
3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Untuk Pembangunan	Rp 1.789.443.000	APBD TA 2023
4	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp 673.139.000	APBD TA 2023
5	Program Penatagunaan Tanah	Rp 81.512.000	APBD TA 2023
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Rp 1.095.017.000	APBD TA 2023
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.790.097.900	APBD TA 2023
	Jumlah Anggaran	Rp 11.493.661.900	

**Tabel 2.5**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang	84,84
2	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Indeks tertib administrasi pertanahan	92,73
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> )	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 2.091.801.000	Perubahan APBD TA 2023
2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 145.722.000	Perubahan APBD TA 2023
3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Untuk Pembangunan	Rp 1.567.496.000	Perubahan APBD TA 2023

4	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp	532.811.500	Perubahan APBD TA 2023
5	Program Penatagunaan Tanah	Rp	166.673.000	Perubahan APBD TA 2023
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Rp	904.594.000	Perubahan APBD TA 2023
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.283.515.400	Perubahan APBD TA 2023
Jumlah Anggaran		Rp	11.692.612.900	

### 2.3. Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2023

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan seluruh program dan kegiatan tahun 2023 dengan anggaran murni sebesar Rp. 11.493.661.900,- terdiri dari Belanja Operasi Rp. 9.815.331.950,- dan Belanja Modal Rp. 1.678.329.950,-. Melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2023 anggaran yang disediakan bertambah sebesar Rp. 198.951.000,- atau meningkat menjadi sebesar Rp. 11.692.612.900,- terdiri dari Belanja Operasi Rp. 9.819.137.950,- dan Belanja Modal Rp. 1.873.474.950,-.

#### 2.3.1. Target Belanja Perangkat Daerah

Anggaran perubahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 sebesar Rp. 11.692.612.900,- digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Target Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Perubahan Anggaran Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran	%
1	Belanja Operasi	Rp 9.819.137.950,-	83,98
2	Belanja Modal	Rp 1.873.474.950,-	16,02
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 11.692.612.900,-</b>	<b>100</b>

**Tabel 2.7**  
**Perubahan Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2023**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.283.515.400</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>30.370.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.070.000
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	2.125.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.450.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	775.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	875.000

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.325.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.750.000
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.063.417.000</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.012.336.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.312.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.312.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.312.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.265.000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.564.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37.772.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	544.000
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.222.000</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	418.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	440.000
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	440.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	308.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	308.000
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	308.000
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>484.000</b>
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	484.000
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>185.210.250</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.730.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.715.250
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.475.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.350.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	440.000
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>525.218.950</b>
	Pengadaan Mebel	472.400.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.818.950
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>185.764.200</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.350.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.914.200
<b>1.8</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>290.829.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.335.000
	Pemeliharaan Mebel	8.575.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.819.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.000.000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>2.091.801.000</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>514.911.000</b>
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	234.004.000
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	280.907.000
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.002.455.000</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	722.200.000
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	280.255.000

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>360.866.000</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	239.286.000
	Sistem Informasi Penataan Ruang	121.580.000
<b>2.4</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>213.569.000</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	38.580.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	108.576.000
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	66.413.000
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>145.722.000</b>
<b>3.1</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>145.722.000</b>
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	145.722.000
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>1.567.496.000</b>
<b>4.1</b>	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.567.496.000</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.567.496.000
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>532.811.500</b>
<b>5.1</b>	<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	<b>532.811.500</b>
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	532.811.500
<b>6.</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>166.673.000</b>
<b>6.1</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>166.673.000</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	166.673.000
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>	<b>904.594.000</b>
<b>7.1</b>	<b>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	<b>707.333.000</b>
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	600.471.000
	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	106.862.000
<b>7.2</b>	<b>Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	<b>197.261.000</b>
	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	142.000.000
	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	55.261.000
<b>JUMLAH</b>		<b>11.692.612.900</b>

### 2.3.2. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Alokasi perubahan anggaran belanja langsung tahun 2023 yang digunakan untuk membiayai program-program yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Anggaran	%	Program	Anggaran	%
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Rp 2.091.801.000	17,89	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 2.091.801.000	17,89

2	Meningkatnya Tertib administrasi pertanahan	Rp 3.317.296.500	28,37	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 145.722.000	1,25
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Untuk Pembangunan	Rp 1.567.496.000	13,41
				Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp 532.811.500	4,56
				Program Penatagunaan Tanah	Rp 166.673.000	1,43
				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Rp 904.594.000	7,74
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> )	Rp 6.283.515.400	53,74	Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.283.515.400	53,74

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**Tabel 3.1**  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	84,84	<b>87,23</b>	102,82 %
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	92,73	<b>93,74</b>	101,09 %
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> )	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A (>80 – 90)	<b>94,12</b> <b>(AA)</b>	104,58%

Analisa pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Capaian Kinerja Sasaran: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang diukur dengan indikator indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang. Pada tahun 2023, indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang terealisasi sebesar 87,23 dari target sebesar 84,84 atau tercapai sebesar 102,82%. Sesuai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja maka capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang termasuk dalam kriteria sangat baik.

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023**  
**Sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator Sasaran	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	(50% Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang ditambah 50% Persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100	84,84	<b>87,23</b>	102,82 %

Realisasi indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang di atas diukur dari rerata persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang dan persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang yang merupakan capaian program. Perhitungan pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang disajikan pada tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Kinerja Tahun 2023**  
**Sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Indikator program	Formula Indikator Program	Perhitungan Kinerja	Realisasi Program	Realisasi Sasaran
Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	{(25% Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang selesai disusun dibagi Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang direncanakan) + (25% Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang selesai disusun dibagi Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang direncanakan) + (15% Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang selesai disusun dibagi Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang direncanakan) + (15% Jumlah Kajian Kelitbangan Tata Ruang yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Kajian Kelitbangan Tata ruang yang disusun) + (20% Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang direncanakan)} dikali 100%		(25% + 25% + 4,17% + 11,25% + 15%) x 100%  <b>= 81,01%</b>	{(50% x 81,01%) + (50% x 93,45%)} x 100  <b>= 87,23</b>

Indikator program	Formula Indikator Program	Perhitungan Kinerja	Realisasi Program	Realisasi Sasaran
	<b>Sumber data</b>			
	Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang selesai disusun _____ X 25%	1 — X 25%		
	Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang direncanakan	1 25%		
	Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang selesai disusun _____ X 25%	1 — X 25%		
	Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang direncanakan	1 25%		
	Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang selesai disusun _____ X 15%	6 — X 15%		
	Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang direncanakan	14 6,43%		
	Jumlah Kajian Kelitbangan Tata Ruang yang ditindaklanjuti _____ X 15%	12 — X 15%		
	Jumlah Kajian Kelitbangan Tata ruang yang disusun	16 11,25%		
	Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang dilaksanakan _____ X 20%	6 — X 20%		
	Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang direncanakan	9 13,33%		
Persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang	{(33% Jumlah Pengawasan Tata Ruang yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pengawasan yang direncanakan) + (33% Jumlah Pengendalian Tata Ruang yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pengendalian Tata Ruang yang direncanakan) + (34% Jumlah Layanan Pemanfaatan Tata Ruang yang diterbitkan dibagi Jumlah Layanan Pemanfaatan Tata Ruang yang dimohonkan)} dikali 100%		(33% + 33% + 27,45%) X 100%	
	<b>Sumber data</b>			
	Jumlah Pengawasan Tata ruang yang dilaksanakan _____ X 33%	3 — X 33%		
	Jumlah Pengawasan Tata ruang yang direncanakan	3 33%		
	Jumlah Pengendalian Tata ruang yang dilaksanakan _____ X 33%	3 — X 33%		
	Jumlah Pengendalian Tata ruang yang direncanakan	3 33%		
	Jumlah Layanan Pemanfaatan Tata ruang yang diterbitkan _____ X 34%	5947 — X 34%		
	Jumlah Layanan Pemanfaatan Tata ruang yang dimohonkan	7366 27,45%		

Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang terealisasi 81,01%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil pengukuran terhadap pelaksanaan fungsi pengaturan dan pembinaan tata ruang. Pengaturan tata ruang meliputi penyediaan rancangan peraturan RTRW



dan RDTR beserta aturan turunannya. Sedangkan pembinaan tata ruang meliputi pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi peraturan/kebijakan bidang penataan ruang dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang substansi hasil kajiannya ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen perencanaan dan rancangan peraturan turunan RTRW dan RDTR maupun pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

Persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang terealisasi 93,45%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil pengukuran terhadap pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan tata ruang dalam rangka pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pengawasan tata ruang, pengendalian tata ruang serta pemberian layanan pemanfaatan ruang berupa telaah teknis kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, rekomendasi tata ruang tanah kasultananan dan tanah kadipaten, dan rekomendasi perubahan penggunaan tanah.

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 yang diukur dari indikator indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang terealisasi sebesar 87,23 dari target sebesar 84,84 atau tercapai sebesar 102,82% menunjukkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang di Kota Yogyakarta yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

**b. Capaian Kinerja Sasaran: Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan**

Capaian kinerja sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan diukur menggunakan indikator indeks tertib administrasi pertanahan. Pada tahun 2023, indeks tertib administrasi pertanahan terealisasi sebesar 93,74 dari target sebesar 92,73 atau tercapai 101,09%. Sesuai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja maka capaian kinerja sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan termasuk dalam kriteria sangat baik.

**Tabel 3.5**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023**  
**Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan**

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator Sasaran	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	(50% persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot ditambah 50% persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah) dikali 100	92,73	<b>93,74</b>	101,09 %

Realisasi indeks tertib administrasi pertanahan di atas diperoleh dari rerata persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot dan persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah yang merupakan capaian program. Perhitungan pengukuran kinerja sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan dapat dilihat pada tabel 3.6.

**Tabel 3.6**  
**Pengukuran Kinerja Tahun 2023**  
**Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan**

Indikator program	Formula Indikator Program	Perhitungan Kinerja	Realisasi Program	Realisasi Sasaran
Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot	(Jumlah Bukti Bayar Tanah aset pemkot yang didaftarkan pensertifikatannya dibagi Data aset tanah Pemkot) dikali 100%		<b>87,49%</b>	$((50\% \times 87,49\%) + (50\% \times 100\%)) \times 100$ $= 93,74$
	<b>Sumber data</b>			
	$\frac{\text{Jumlah Bukti Bayar Tanah aset Pemkot yang didaftarkan pensertifikatannya}}{\text{Data aset tanah Pemkot}} \times 100\%$	902 ——— X 100% 1031 87,49%		
Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah	(Jumlah tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah pemkot dibagi jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot pada tahun-n) dikali 100%		<b>100%</b>	
	<b>Sumber data</b>			
	$\frac{\text{Jumlah tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah pemkot}}{\text{Jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pada tahun n}} \times 100\%$	3 ——— X 100% 3 100%		

Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot terealisasi sebesar 87,49%. Capaian ini diperoleh dari terselesaikannya pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot Yogyakarta. Sampai dengan tahun 2023 telah dilaksanakan pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot Yogyakarta sebanyak 902 bidang dari 1031 bidang tanah aset Pemkot Yogyakarta yang direncanakan atau terealisasi sebesar 87,49%. Dari 902 tanah aset Pemkot yang telah didaftarkan pensertifikatannya, sebanyak 684 telah terbit sertifikatnya. Semakin banyak tanah aset Pemkot Yogyakarta yang didaftarkan dan terbit sertifikatnya maka semakin banyak tanah aset Pemkot Yogyakarta yang memiliki legalitas dan kepastian hukum. Kemudian, sertifikat yang telah terbit dapat menjadi dasar pertimbangan dalam optimalisasi pemanfaatan aset tanah tersebut.

Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah terealisasi sebesar 100%. Capaian tersebut didukung oleh terselesaikannya pengadaan tanah di tahun 2023 sebanyak 3 lokasi (1 Fasum dan 2 RTHP) yang setiap tahapan pengadaannya terlaksana sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Melalui pengadaan tanah tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta telah memberikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan tanah untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Sasaran Meningkatnya tertib adminitrasi pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 yang diukur dari indikator indeks tertib administrasi pertanahan terealisasi sebesar 93,74 dari target 92,73 atau tercapai 101,09% menunjukkan bahwa tata kelola administrasi pertanahan berjalan semakin baik yang diwujudkan melalui peningkatan pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot Yogyakarta serta proses pengadaan tanah yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

**c. Capaian Kinerja Sasaran: Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)**

Capaian kinerja sasaran meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) diukur menggunakan indikator kinerja berupa hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat, dengan formula indikator sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Indikator dan Formula Indikator**  
**Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)**

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Indikator
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> )	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat

**Tabel 3.8**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**  
**Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)**

Indikator Sasaran	Formula Indikator Sasaran	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A (>80 –90)	<b>94,12</b> (AA)	104,58%

Adanya perubahan peraturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi menyebabkan adanya perbedaan metode yang digunakan dalam penetapan target dan pengukuran realisasi. Target A (nilai >80 - 90) ditetapkan berdasarkan kategori hasil penilaian reformasi birokrasi sesuai dengan PermenPANRB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sedangkan realisasi sebesar 94,12 diperoleh dari hasil evaluasi implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 sampai dengan Triwulan III oleh Inspektorat mengacu kepada PermenPANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Permen PANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Sasaran meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) tahun 2023 yang diukur dari indikator hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat terealisasi sebesar 94,12 (AA) dari target A (>80 – 90) atau tercapai 104,58% menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) sudah berjalan dengan baik.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

#### 3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

**Tabel 3.9**  
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi		Tahun 2023		
			2021	2022	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	71,92	81,97			
		Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang			84,84	87,23	102,82%
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	86,99	100,57	92,73	93,74	101,09%
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> )	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	95,49	90,36	A (>80 –90)	94,12 (AA)	104,58%

Tahun 2023 merupakan tahun pertama Renstra 2023 – 2026. Rumusan formula indikator kinerja program dan sasaran pada Renstra 2023 – 2026 berbeda dengan rumusan formula indikator kinerja program dan sasaran pada Renstra 2017 – 2022 sehingga realisasi kinerja tahun 2023 tidak sepenuhnya dapat dibandingkan dengan data realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Jika dipersandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2021, realisasi kinerja tahun 2023 mengalami baik peningkatan maupun penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan dari adanya perbedaan cara pengukuran kerjanya.

### 3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pada masa Renstra 2023 – 2026 dan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta telah berhasil mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

**Tabel 3.10**  
**Target dan Realisasi Kinerja Renstra 2023 – 2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				Realisasi				Capaian 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	84,84	89,63	93,47	97,32	87,23	-	-	-	89,63%
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	92,73	93,02	93,31	93,60	93,74	-	-	-	100,15%
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> )	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)	94,12 (AA)	-	-	-	104,58%

Jika dibandingkan terhadap target akhir Renstra maka terdapat 2 (dua) sasaran yang capaiannya di tahun 2023 ini telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2026 yaitu sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan yang terealisasi sebesar 93,74 melebihi target tahun 2026 sebesar 93,60 atau tercapai sebesar 100,15% dan sasaran meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) yang terealisasi sebesar 94,12 dari target tahun 2026 nilai A (>80 – 90) atau tercapai 104,58%. Sedangkan sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang realisasinya telah mencapai 89,63% dari yang direncanakan sebesar 87,17% saja.

### 3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Sejenis

Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak adanya standar nasional untuk pengukuran indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Selain itu jika ditemukan sasaran yang sama pada organisasi/instansi sejenis baik di tingkat kota/kabupaten ataupun propinsi ternyata perumusan indikator dan formula perhitungannya berbeda-beda.

Namun demikian, terdapat mekanisme pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah yang dilaksanakan di tingkat propinsi dan di tingkat nasional. Hasil

pengawasan penataan ruang yang dilakukan oleh bupati/walikota disampaikan kepada gubernur. Sedangkan pelaksanaan pengawasan penataan ruang yang dilakukan oleh gubernur disampaikan kepada menteri. Pada tahun 2022 Kota Yogyakarta berhasil menempati peringkat I Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang se-DIY dan peringkat I Nasional kategori Kota untuk penilaian pelaksanaan kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang tahun 2021 dengan nilai 100 atau kategori baik. Pada tahun 2023, pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang daerah di tingkat propinsi baru mencapai tahap pelaporan data dukung yang akan digunakan untuk penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah di tingkat nasional akan dilaksanakan di tahun 2024.

**Tabel 3.11**  
**Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang se-DIY Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Aspek I	Aspek II	Aspek III	Aspek IV	Aspek V	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
		Pengaturan	Pembinaan	Perencanaan	Pemanfaatan Ruang	Pengendalian		
1	Kulon Progo	70	65	83	88	0	61	Sedang
2	Bantul	77	65	95	100	100	87	Baik
3	Gunungkidul	60	87	80	100	67	79	Sedang
4	Sleman	85	100	93	100	100	96	Baik
5	Kota Yogyakarta	100	100	100	100	100	100	Baik

### 3.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor pendorong keberhasilan, faktor penghambat serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian target sasaran kinerja, diantaranya:

#### a. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang

Faktor Pendorong

1. Telah tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta
2. Tersedianya sistem informasi tata ruang
3. Koordinasi efektif dengan pemangku kepentingan/*stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan
4. Ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terukur sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan
5. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dan SDM yang kompeten

Faktor penghambat

1. Adanya perubahan aturan dan/atau adanya aturan-aturan baru baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempengaruhi penyusunan aturan tata ruang Daerah

2. Perubahan aturan pada RTRW dan RDTR baru sehingga diperlukan penyesuaian terhadap substansi yang baru yang berpotensi pada perbedaan pemahaman dari para pemangku kepentingan/perangkat daerah teknis terkait
3. Belum sinkronnya ketentuan peraturan zonasi dengan ketentuan kegiatan usaha dalam aplikasi OSS yang kewenangannya ada di Pemerintah Pusat lintas sektor
4. Tidak tersedianya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tata ruang sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang masih minim atau tidak dapat dilaksanakan
5. Belum tersedianya peraturan insentif disinsentif sebagai dasar pelaksanaan mekanisme insentif dan disinsentif karena Peraturan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota yang baru selesai disusun pada tahun 2023

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan

1. Harmonisasi dan sinkronisasi aturan tata ruang daerah dengan aturan lainnya
2. Pelaksanaan diseminasi aturan tata ruang yang lebih intensif
3. Updating muatan RDTR online pada sistem informasi tata ruang
4. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang melalui identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di lapangan
5. Identifikasi pemberian insentif disinsentif dan penyiapan bahan penetapan aturan insentif disinsentif

#### **b. Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan**

Faktor Pendorong

1. Koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan/*stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan
2. Ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terukur sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan
3. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dan SDM yang kompeten

Faktor penghambat

1. Keterbatasan kemampuan anggaran Pemkot Yogyakarta menjadi kendala dalam upaya pemenuhan kebutuhan tanah untuk kepentingan umum
2. Kendala dalam berkoordinasi dengan pemilik tanah yang berdomisili di luar kota / luar negeri
3. Tahapan pensertifikatan tanah aset Pemkot tergantung dari SOP/mekanisme pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
4. Kendala teknis dalam pelacakan berkas pengadaan tanah non jalan sehingga proses pendaftaran pensertifikatan tanah bidang non jalan ada yang belum dapat dilaksanakan

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan

1. Pengusulan pengadaan tanah sesuai skala prioritas pada setiap tahun anggaran
2. Koordinasi intensif melalui media komunikasi dan koordinasi dengan Kantah Kota Yogyakarta untuk efektivitas tahapan pengadaan tanah di Kantah Kota Yogyakarta

3. Koordinasi yang intensif dengan Kantor Pertanahan dan OPD teknis lainnya
4. Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pelacakan dokumen

**c. Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)**

Faktor Pendorong

1. Komitmen terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi
2. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan/*stakeholder* penyelenggaraan reformasi birokrasi

Faktor penghambat

1. Perubahan kebijakan penyelenggaraan penilaian mandiri reformasi birokrasi
2. Kurangnya literasi reformasi birokrasi

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan

1. Tertib administrasi dalam penyelenggaraan tata kelola kegiatan
2. Sosialisasi dan meningkatkan keterlibatan seluruh jajaran pegawai dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi

### 3.2.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika dikaitkan antara capaian kinerja dengan anggaran, capaian kinerja yang baik dan diikuti dengan realisasi anggaran di bawah 100% menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran.

**Tabel 3.12**  
**Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023**

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi	Efisiensi
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	84,84	87,23	<b>102,82%</b>	2.091.801.000	2.061.629.630	<b>98,56%</b>	<b>1,44%</b>
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	92,73	93,74	<b>101,09%</b>	3.317.296.500	3.198.677.330	<b>96,42%</b>	<b>3,58%</b>
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> )	A (>80 – 90)	94,12 (AA)	<b>104,58%</b>	6.283.515.400	5.996.589.881	<b>95,43%</b>	<b>4,57%</b>



Analisa efisiensi penggunaan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang  
 Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang dapat tercapai melampaui target yaitu sebesar 102,82% dengan realisasi anggaran sebesar 98,56%. Dari sisa anggaran sebesar 1,44% atau Rp. 30.171.370,- terdapat efisiensi anggaran yang berasal dari optimalisasi koordinasi melalui platform online, media belanja cetak kajian yang dialihkan outputnya berupa softfile kajian, pelaksanaan survei lapangan yang dilaksanakan melalui peta online sehingga tidak diperlukan belanja makan survei, dan sisa hasil negosiasi pada kontrak pengadaan jasa konsultasi.
2. Sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan  
 Sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan dapat tercapai melampaui target yaitu sebesar 101,09% dengan realisasi anggaran sebesar 96,42%. Dari sisa anggaran sebesar 3,58% atau Rp. 118.619.170,- terdapat efisiensi anggaran yang berasal dari belanja pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot yang direalisasikan sesuai dengan biaya dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, optimalisasi koordinasi melalui platform online, belanja cetak yang dialihkan menjadi softfile, pelaksanaan survei lapangan yang dilaksanakan melalui peta online sehingga tidak diperlukan belanja bahan bakar minyak dan belanja makan survei, dan sisa hasil negosiasi pada kontrak pengadaan jasa konsultasi.
3. Sasaran meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)  
 Sasaran meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) tercapai sebesar 104,58% dengan realisasi anggaran sebesar 95,43%. Dari sisa anggaran sebesar 4,57% atau Rp. 286.925.519,- terdapat efisiensi anggaran yang diperoleh dari pembayaran gaji sesuai kebutuhan, selisih harga pasar dengan standar harga untuk pengadaan barang dan sisa hasil negosiasi pada kegiatan pemeliharaan bangunan kantor.

### 3.2.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Program Tahun 2023**  
**Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang**

Indikator Sasaran	Tahun 2023			Program	Indikator Program	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	84,84	87,23	102,82 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	80,07%	<b>81,01%</b>	101,07%

					Persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang	89,61%	<b>93,45%</b>	104,29%
--	--	--	--	--	---	--------	---------------	---------

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang didukung oleh capaian kinerja 1 (satu) program yaitu program penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana disajikan pada tabel 3.13. Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Indikator persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang terealisasi melebihi target yaitu sebesar 81,01% atau tercapai 101,17%. Capaian tersebut termasuk dalam kategori sangat baik.

Kegiatan tahun 2023 yang menunjang capaian tersebut yaitu : 1) Penyediaan dokumen perencanaan dan rancangan peraturan tata ruang meliputi penyusunan dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) dan penyusunan rancangan peraturan Walikota tentang petunjuk teknis RDTR Kota Yogyakarta dalam upaya penyediaan peraturan turunan RTRW dan RDTR yang telah ditetapkan di tahun 2021, 2) Penyusunan kajian yang telah ditindaklanjuti substansinya dalam penyusunan dokumen perencanaan, rancangan peraturan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi kajian TPZ kawasan penyangga Kota Yogyakarta, kajian pengembangan zona bonus Kota Yogyakarta, dan kajian kesesuaian pemanfaatan ruang kegiatan reklame paska penerapan peraturan pelaksanaan, dan 3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan tata ruang yang meliputi sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang bagi ASN dan masyarakat.

Selain itu, dilaksanakan kegiatan penyediaan dan pengembangan sistem informasi tata ruang melalui aplikasi Gatra Matra yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh informasi pengaturan pemanfaatan ruang di kota Yogyakarta sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Yogyakarta.

2. Indikator persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang terealisasi sebesar 93,45% atau tercapai 104,29%. Capaian tersebut termasuk dalam kategori sangat baik.

Kegiatan yang mendukung capaian tersebut yaitu : 1) Pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan pengawasan tata ruang meliputi kegiatan pengawasan tata ruang, pengawasan khusus, dan pengawasan teknis, 2) Pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan pengendalian tata ruang meliputi kegiatan audit tata ruang, pemberian insentif disinsentif bidang penataan ruang, dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dan pertanahan, dan 3) Layanan pemanfaatan ruang berupa pemberian 1475 telaah teknis kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (TT-KKPR) meliputi 620 TT-KKPR bangunan gedung dan 855 TT-KKPR reklame, 100 rekomendasi

kesesuaian tata ruang, dan 6 rekomendasi perubahan penggunaan tanah sehingga sampai dengan tahun 2023 telah dilaksanakan 5947 layanan pemanfaatan ruang.

Dari hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang, didapatkan nilai persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta tahun 2023 sebesar 85,22%. Hasil tersebut merupakan capaian sasaran ke-5 Pemerintah kota Yogyakarta “Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang”

**Tabel 3.14**  
**Realisasi Program Tahun 2023**  
**Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan**

Indikator Sasaran	Tahun 2023			Program	Indikator Program	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	92,73	93,74	101,809 %	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot	85,45%	<b>87,49%</b>	102,39%
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah	100 %	<b>100 %</b>	100 %

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan didukung oleh capaian kinerja 2 (dua) program yaitu program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dan program pengelolaan tanah kosong sebagaimana disajikan pada tabel 3.14. Analisis program yang menunjang keberhasilan capaian kinerja sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dengan indikator persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% atau tercapai 100%.

Capaian tersebut termasuk dalam kategori sangat baik yang ditunjang oleh terlaksananya proses pengadaan tanah di tahun 2023 sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebanyak 3 lokasi yaitu 1 lokasi untuk pengadaan tanah untuk IPAL Komunal di kelurahan Karangwaru dan 2 lokasi untuk pengadaan tanah untuk RTHP di kelurahan Prawirodirjan.

2. Program Pengelolaan Tanah Kosong dengan indikator persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot, terealisasi sebesar 87,49% dari target sebesar 85,45% atau tercapai 102,39%.

Capaian tersebut termasuk dalam kategori sangat baik yang didukung oleh terselesaikannya pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot di tahun 2023 sebanyak 140 bidang dari target sebanyak 119 bidang saja. Sehingga sampai dengan tahun 2023 telah dilaksanakan pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot sebanyak 902 bidang dari 1031 bidang tanah aset Pemkot yang direncanakan.

Selain kedua program di atas, sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan juga didukung oleh 3 (tiga) program lain yang capaiannya pada tahun 2023 disajikan pada tabel 3.15.

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Program Tahun 2023**  
**Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan**

Program	Indikator Program	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sesuai SOP	100 %	<b>100 %</b>	100 %
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase permohonan surat rekomendasi yang diterbitkan sesuai SOP	100 %	<b>100 %</b>	100 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase penatausahaan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	81,22%	<b>81,22%</b>	100%
	Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	25%	<b>100%</b>	400%

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sesuai SOP, terealisasi sesuai target sebesar 100%. Capaian tersebut didukung oleh terfasilitasinya permasalahan pertanahan yang masuk sesuai dengan permohonan terkait pengosongan kios di kelurahan Terban yang berdiri di atas tanah aset milik Pemkot Yogyakarta.
2. Program Penatagunaan Tanah dengan indikator persentase permohonan surat rekomendasi yang diterbitkan sesuai SOP, terealisasi sesuai target sebesar 100%. Capaian tersebut berupa terlaksananya layanan penerbitan 13 rekomendasi pemanfaatan tanah negara.
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan  
Indikator persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terealisasi sesuai target sebesar 81,22%. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya pendaftaran pensertifikatan tanah kasultanan/kadipaten sebanyak 50 bidang tanah di tahun 2023 sehingga total telah terlaksana pendaftaran pensertifikatan tanah kasultanan/kadipaten sebanyak 735 dari 905 bidang tanah yang direncanakan.  
Indikator persentase pengawasan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 25% atau tercapai 400%. Capaian tersebut diperoleh dari terlaksananya monitoring dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan tanah kasultanan/kadipaten di Kota Yogyakarta sebanyak 60 lokasi. Realisasi melebihi target terjadi karena adanya arahan kebijakan dari DIY untuk melaksanakan monev berbasis pada data yang terdapat pada aplikasi INTAN TARU yang dikembangkan oleh DIY sehingga terjadi lonjakan target di tahun 2023 dari 15 menjadi 60 lokasi.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

**Tabel 3.16**  
**Realisasi Program Tahun 2023**  
**Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)**

Program	Indikator Program	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> )	A	A	100 %

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) terealisasi A (nilai) dari target A (nilai) atau tercapai 100%. Realisasi tersebut merupakan hasil penilaian SAKIP tahun 2022.

### 3.2.7. Analisis Program/Kegiatan terkait dengan Pengarus utamaan Gender

Pembangunan yang responsif gender dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta diantaranya melalui kegiatan pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau publik yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.

Ketersediaan RTHP di wilayah Kota Yogyakarta merupakan kebutuhan masyarakat. RTHP dapat menjadi tempat bersantai bagi seluruh warga masyarakat misalnya untuk para lansia menikmati waktu luangnya, anak-anak bermain, wanita dan Ibu hamil berolahraga untuk menunjang kesehatannya, serta kaum miskin maupun kaum disabilitas yang memiliki keterbatasan memperoleh manfaat dari keberadaan RTHP yang lokasinya tidak jauh dari rumah tinggalnya.

Pada saat ini ketersediaan RTHP di Kota Yogyakarta belum dapat memenuhi standar luasan sebesar 20% dari total luas wilayahnya sehingga kebutuhan tanah untuk RTHP di Kota Yogyakarta masih sangat tinggi. Untuk itu Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta berupaya memenuhi ketersediaan lahan untuk RTHP tersebut melalui kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan pengadaan tanah untuk RTHP sebanyak 2 (dua) lokasi dengan total luasan 435 m<sup>2</sup> di Kelurahan Prawirodirjan.

### 3.2.8. Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2023 ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta telah menginisiasi pengembangan inovasi, sebagai berikut:

## 1. GATRA MATRA JOGJA

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada tahun 2023 mengembangkan platform Gatra Matra Jogja atau Gapura Aksesibilitas Terintegrasi Pemanfaatan Tata Ruang Kota Yogyakarta yang mengakomodasi seluruh layanan yang dilakukan. Pada Gatra Matra Jogja ini, portal atau *gate*, sebagai pintu utama aksesibilitas diibaratkan sebagai gapura, yaitu gerbang besar yang mampu membuka luas dan leluasa masuk ke dalamnya sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi seluas mungkin berupa ketentuan teknis tata ruang dalam Perwal RDTR. Terintegrasi dimaksudkan sebagai satu jalur besar keterpaduan beberapa aplikasi atau program terkait tata ruang dalam rumah besar alamat portal ini. Pemanfaatan ruang mengandung arti bahwa kebutuhan utama Perwal RDTR adalah berupa pemenuhan pemanfaatan ruang sebagai instrumen ukuran memenuhi kesesuaian pemanfaatan ruang daerah dan menjadi perhitungan indikator sasaran daerah Kota Yogyakarta.

Gatra Matra Jogja ([gatramatra.jogjakota.go.id](http://gatramatra.jogjakota.go.id)) menjadi satu portal resmi pemerintah daerah yang menghadirkan sistem tata ruang dengan kedalaman utuh substansi Perwal RDTR yang bersifat operasional untuk layanan publik yang bersifat mudah diakses menggunakan aplikasi atau program yang populis dan mudah dipahami umum. Keberlangsungan operasional portal ini dapat memberikan gambaran peningkatan kinerja organisasi bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Gatra Matra Jogja pada tahun 2023 merupakan penyempurnaan dan pengembangan aplikasi agar dapat dimanfaatkan dengan lebih mudah, lengkap, dan akurat. Adapun pengembangan Gatra Matra Jogja pada tahun 2023 adalah:

### a. Sinkronisasi data dengan RDTR

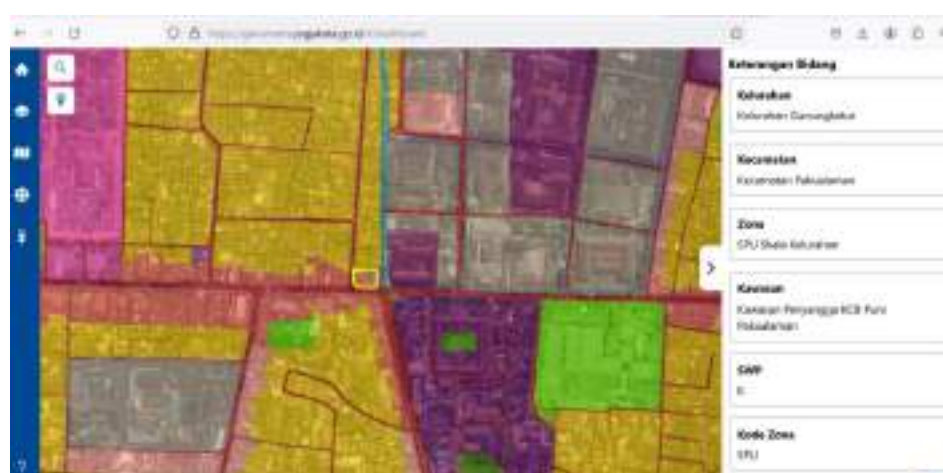
Selama penggunaan aplikasi Gatra Matra, dijumpai beberapa permasalahan data aplikasi dengan data pada RDTR. Permasalahan tersebut timbul akibat ketidakcermatan input data awal karena banyaknya data yang harus dimasukkan. Selain itu, terdapat beberapa data yang perlu penjelasan lebih lanjut karena perlu pemahaman aturan. Data tersebut diinventarisasi dan kemudian dilakukan sinkronisasi dengan data aturan pada RDTR sehingga informasi yang dihasilkan dari aplikasi menjadi lebih lengkap dan akurat.

### b. Penambahan fitur pencarian lokasi

Untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan aplikasi Gatra Matra, dilakukan penambahan fitur pencarian titik lokasi yang diinginkan. Pencarian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan nama jalan, nama daerah/wilayah, atau titik koordinat.

### c. Penyempurnaan Menu Layanan

Menu link layanan Informasi Kesesuaian Tata Ruang (IKTR) yang sebelumnya masih menggunakan google form, dikembangkan menjadi sistem aplikasi layanan yang terintegrasi dengan sistem pada Gatra Matra Jogja. Menu layanan ini disediakan untuk melayani masyarakat yang akan melanjutkan layanan dari informasi tata ruang menjadi layanan produk hukum yang legal.



**Gambar 3.1**  
Tampilan Laman dan Informasi Platform GATRA MATRA

## 2. Layanan Online Pertanahan dan Tata Ruang (Lontar)

Sebelum platform layanan pada GATRA MATRA JOGJA terintegrasi sempurna secara sistem dan keberlanjutan pelayanan online masih dibutuhkan, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta masih menyediakan

layanan online dengan transformasi antara melalui layanan online semi otomatis (melalui pemrosesan manual dan input pemohon secara digital dengan layanan melalui tautan [linktr.ee/dinpertarujogja](http://linktr.ee/dinpertarujogja)).



**Gambar 3.2**  
**Inovasi Layanan Online Tahun 2023**

### 3.2.9. Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tidak lepas dari kolaborasi dan koordinasi dengan OPD teknis ataupun *stakeholder* lainnya dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan pendukung sasaran:

1. Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang, diantaranya:
  - a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penyiapan bahan kebijakan bidang penataan ruang dilaksanakan dengan melibatkan OPD teknis Pemkot Yogyakarta seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Perhubungan, dan Bagian Hukum, OPD teknis di tingkat Provinsi/pusat, akademisi, organisasi profesi maupun unsur masyarakat.



- b. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui Forum Penataan Ruang Daerah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur baik dari akademisi, organisasi profesi, maupun tokoh masyarakat.
  - c. Penyiapan telaah teknis untuk penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dilakukan secara online melalui perizinanonline.jogjakota.go.id, kolaborasi intensif dilaksanakan dengan DPMPTSP terkait sistem, prosedur, maupun penanganan permasalahan pada proses pelayanan tersebut
  - d. Pembinaan tata ruang dalam bentuk sosialisasi kebijakan bidang penataan ruang, dilaksanakan dengan melibatkan akademi dan praktisi di bidang tata ruang di Kota Yogyakarta.
2. Sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan, diantaranya:
- a. Pensertifikatan aset Pemkot Yogyakarta untuk jalan dan non jalan, dilaksanakan dengan dukungan dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta serta kolaborasi dengan wilayah/Kelurahan dalam rangka proses verifikasi pendaftaran pensertifikatan jalan.
  - b. Pengadaan tanah aset Pemkot Yogyakarta, dilaksanakan dengan melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), wilayah/Kelurahan, dan DLH.

### 3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 96,27% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Realisasi anggaran terbesar terdapat pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar 98,56% sedangkan realisasi anggaran terkecil terdapat pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan sebesar 94,04%.

Secara rinci realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 3.17.

**Tabel 3.17**  
**Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.283.515.400</b>	<b>5.996.589.881</b>	<b>95,43%</b>
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>30.370.000</b>	<b>30.107.500</b>	<b>99,14%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.070.000	5.974.000	98,42%
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	2.125.000	2.121.500	99,84%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.450.000	1.416.000	97,66%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	775.000	767.000	98,97%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	875.000	863.000	98,63%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.325.000	16.276.000	99,70%

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.750.000	2.690.000	97,82%
1.2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.063.417.000</b>	<b>4.822.639.531</b>	<b>95,24%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.012.336.000	4.771.834.531	95,20%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.312.000	3.312.000	100,00%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.312.000	3.312.000	100,00%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.312.000	3.312.000	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.265.000	1.213.000	95,89%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.564.000	1.553.000	99,30%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37.772.000	37.559.000	99,44%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	544.000	544.000	100,00%
1.3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.222.000</b>	<b>2.212.000</b>	<b>99,55%</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	418.000	418.000	100,00%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	440.000	437.000	99,32%
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	440.000	437.000	99,32%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	308.000	308.000	100,00%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	308.000	304.000	98,70%
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	308.000	308.000	100,00%
1.4	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>484.000</b>	<b>483.000</b>	<b>99,79%</b>
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	484.000	483.000	99,79%
1.5	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>185.210.250</b>	<b>179.300.111</b>	<b>96,81%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.730.000	3.853.500	81,47%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.715.250	3.712.050	99,91%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.475.000	12.470.750	99,97%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	4.088.250	90,85%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.350.000	154.741.561	97,11%
1.6	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>525.218.950</b>	<b>504.376.400</b>	<b>96,03%</b>
	Pengadaan Mebel	472.400.000	456.640.000	96,66%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.818.950	47.736.400	90,38%
1.7	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>185.764.200</b>	<b>182.781.606</b>	<b>98,39%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000	6.500.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.350.000	3.844.034	88,37%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.914.200	172.437.572	98,58%
1.8	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>290.829.000</b>	<b>274.689.733</b>	<b>94,45%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.100.000	25.789.500	88,62%

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.335.000	90.864.593	90,56%
	Pemeliharaan Mebel	8.575.000	8.275.000	96,50%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.819.000	38.565.000	94,48%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>2.091.801.000</b>	<b>2.061.629.630</b>	<b>98,56%</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>514.911.000</b>	<b>505.225.100</b>	<b>98,12%</b>
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	234.004.000	230.062.200	98,32%
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	280.907.000	275.162.900	97,96%
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.002.455.000</b>	<b>996.301.730</b>	<b>99,39%</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	722.200.000	718.500.950	99,49%
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	280.255.000	277.800.780	99,12%
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>360.866.000</b>	<b>357.649.000</b>	<b>99,11%</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	239.286.000	239.148.000	99,94%
	Sistem Informasi Penataan Ruang	121.580.000	118.501.000	97,47%
<b>2.4</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>213.569.000</b>	<b>202.453.800</b>	<b>94,80%</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	38.580.000	38.442.000	99,64%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	108.576.000	108.429.000	99,86%
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	66.413.000	55.582.800	83,69%
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>145.722.000</b>	<b>137.806.850</b>	<b>94,57%</b>
<b>3.1</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>145.722.000</b>	<b>137.806.850</b>	<b>94,57%</b>
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	145.722.000	137.806.850	94,57%
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>1.567.496.000</b>	<b>1.543.314.940</b>	<b>98,46%</b>
<b>4.1</b>	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.567.496.000</b>	<b>1.543.314.940</b>	<b>98,46%</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.567.496.000	1.543.314.940	98,46%
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>532.811.500</b>	<b>503.268.660</b>	<b>94,46%</b>
<b>5.1</b>	<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	<b>532.811.500</b>	<b>503.268.660</b>	<b>94,46%</b>
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	532.811.500	503.268.660	94,46%
<b>6.</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>166.673.000</b>	<b>163.640.280</b>	<b>98,18%</b>
<b>6.1</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>166.673.000</b>	<b>163.640.280</b>	<b>98,18%</b>

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	166.673.000	163.640.280	98,18%
<b>7.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>	<b>904.594.000</b>	<b>850.646.600</b>	<b>94,04%</b>
7.1	<b>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	<b>707.333.000</b>	678.760.900	95,96%
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	600.471.000	578.750.900	96,38%
	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	106.862.000	100.010.000	93,59%
7.2	<b>Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	<b>197.261.000</b>	171.885.700	87,14%
	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	142.000.000	135.679.700	95,55%
<b>JUMLAH</b>		<b>11.692.612.900</b>	<b>11.256.896.841</b>	<b>96,27%</b>

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, realisasi anggaran terbesar terdapat pada program/kegiatan penunjang sasaran meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang sebesar 98,56%. Sedangkan realisasi anggaran terkecil terdapat pada program/kegiatan penunjang sasaran meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) sebesar 95,43% yang disebabkan belanja gaji yang menyesuaikan kebutuhan sehingga tidak seluruh anggaran gaji dapat direalisasikan.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.18**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023**

No	Sasaran	Kinerja			Program	Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	84,84	87,23	102,82	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.091.801.000	2.061.629.630	98,56
2	Meningkatnya Tertib administrasi pertanahan	92,73	93,74	101,09	Program Penyelesaian Sengketa Tanah	145.722.000	137.806.850	94,57
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1.567.496.000	1.543.314.940	98,46
					Program Pengelolaan Tanah Kosong	532.811.500	503.268.660	94,46
					Program Penatagunaan Tanah	166.673.000	163.640.280	98,18
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	904.594.000	850.646.600	94,04

3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> )	A (>80 – 90)	94,12 (AA)	104,58	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.283.515.400	5.996.589.881	95,43
					<b>Jumlah</b>	<b>11.692.612.900</b>	<b>11.256.896.841</b>	<b>96,27</b>

# BAB IV

## PENUTUP

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada tahun 2023 yang merupakan tahun pertama masa Renstra 2023 – 2026. Hasil capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada tahun 2023 adalah:
  - a. Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang terealisasi melebihi target sebesar 87,23
  - b. Meningkatnya Tertib administrasi pertanahan dengan indikator indeks tertib administrasi pertanahan terealisasi sebesar 93,74 dari target sebesar 92,73
  - c. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) terealisasi sebesar 94,12 (AA) dari target nilai A (>80 – 90)
2. Capaian sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada tahun 2023 adalah:
  - a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang tercapai 102,82%
  - b. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan tercapai 101,09%
  - c. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) tercapai 104,58%
3. Realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 adalah sebesar Rp 11.256.896.841,- atau terealisasi sebesar 96,27%..

Meskipun pada tahun 2023 seluruh target kinerja dapat dicapai dengan sangat baik, namun sesungguhnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta juga menghadapi permasalahan yang dapat menghambat upaya pencapaian kinerja ke depan yang perlu dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan diantaranya terkait adanya aturan-aturan baru baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Yogyakarta yang dapat mempengaruhi pencapaian target penyusunan rancangan aturan tata ruang Daerah, perubahan kebijakan terkait penerbitan surat keterangan tanah dari Kantah Kota Yogyakarta yang dapat mempengaruhi capaian layanan rekomendasi kesesuaian tata ruang untuk pemanfaatan tanah kasultanan/kadipaten atau perubahan aturan/kebijakan penyelenggaraan penilaian reformasi birokrasi yang dapat mempengaruhi capaian nilai reformasi birokrasi.

Adapun rencana tindak lanjut untuk perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi aturan tata ruang daerah dengan aturan lainnya
2. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pengambilan kebijakan teknis
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan berkala

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 ini akan dimanfaatkan oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja ke depan, diantaranya untuk perbaikan target sasaran maupun program.

# LAMPIRAN

---

Lampiran 1. *Cascading*/Pohon Kinerja

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Lampiran 4. Matriks Tindak Lanjut Evaluasi LHE SAKIP Tahun 2023

Lampiran 5. Berita Acara Reviu Rencana Strategis



**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)**

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang  
**(TUJUAN PERANGKAT DAERAH)**

**INDIKATOR**  
Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang  
**(SASARAN PERANGKAT DAERAH)**

**INDIKATOR**  
Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang

TARGET					
2022	2023	2024	2025	2026	
80.53	84.84	89.63	93.47	97.32	

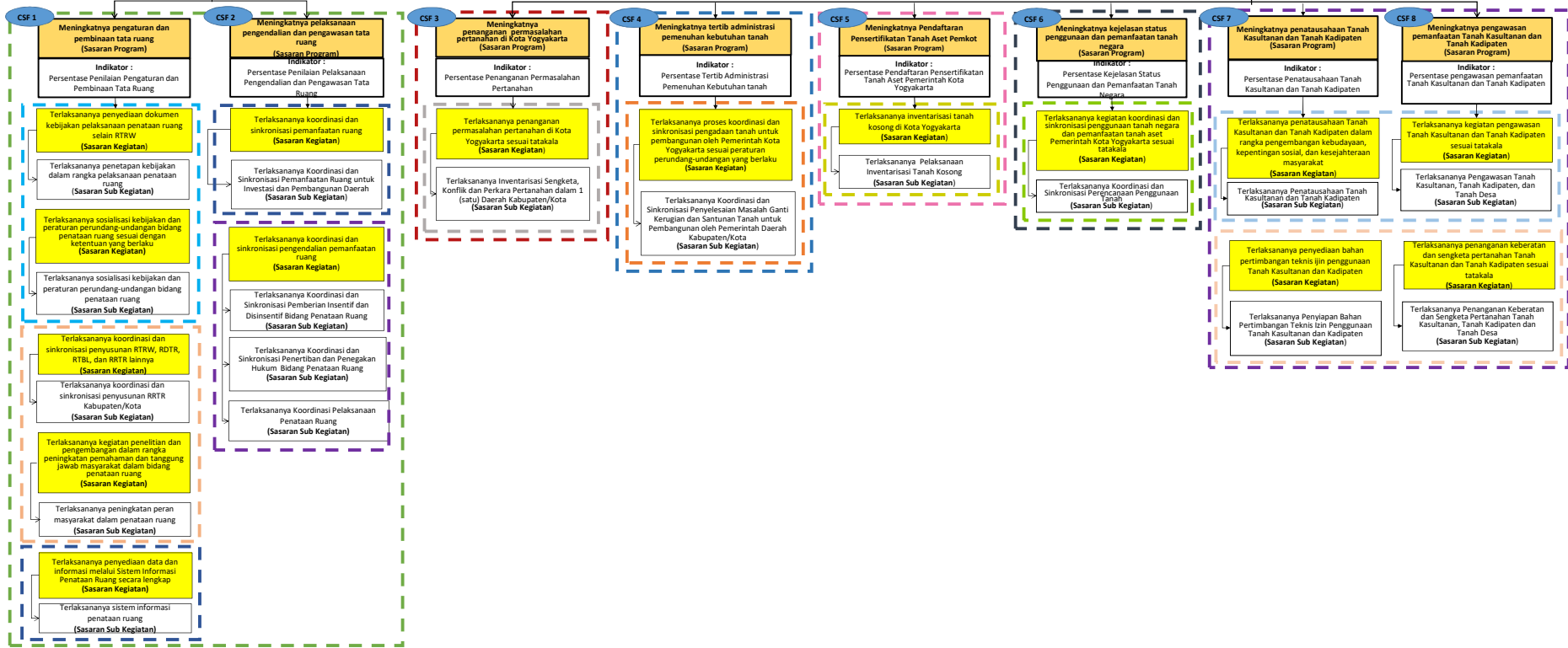
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan  
**(TUJUAN PERANGKAT DAERAH)**

**INDIKATOR**  
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan  
**(SASARAN PERANGKAT DAERAH)**

**INDIKATOR**  
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

TARGET					
2022	2023	2024	2025	2026	
86.95	92.73	93.02	93.31	93.60	



- Keterangan:**
- PROGRAM PENYELANGGARAAN PENATAAN RUANG
  - Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
  - Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
  - Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
  - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
  - PROGRAM PENATAUSAHAAN TANAH
  - Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten
  - PROGRAM PENYELANGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
  - Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
  - Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten



REVIU CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) 2023-2026

Iselon 2 / Kepala Perangkat Daerah	Kriteria	Indikator Kinerja	Target					Program	Kelas Indikator Kinerja 3	Iselon 3					Target					Kegiatan	Nama, Tahun, Tahap 4 / Sub Koordinator Pemasangan	Kelas	Iselon 4 / Sub Koordinator					Target					Pagu Iselon 4 / Sub Koordinator Per Indikator Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026					
			Kriteria	Indikator Kinerja	Kriteria	Indikator Kinerja	Kriteria			Indikator Kinerja	Kriteria	Indikator Kinerja	Kriteria	Indikator Kinerja	Kriteria	Indikator Kinerja	Kriteria	Indikator Kinerja	Kriteria				Indikator Kinerja	Kriteria	Indikator Kinerja	Kriteria	Indikator Kinerja	Kriteria	Indikator Kinerja	Kriteria	Indikator Kinerja	Kriteria	Indikator Kinerja				
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	80.53%	84.84%	89.63%	93.47%	97.32%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kepala Bidang Tata Ruang	Meningkatkan Pengaturan dan pembinaan tata ruang	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	80.07%	86.18%	90.41%	94.64%	801,049,120	1,554,984,120	988,800,000	1,244,320,000	1,275,170,000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang	Melaksanakan penyediaan dokumen kebijakan pelaksanaan penataan ruang selain RTRW	Jumlah dokumen kebijakan Raperda dan Kaperwal bidang penataan ruang selain RTRW selesai	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	225,306,000	228,206,080	248,400,000	260,820,000	273,870,000				
									Meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	-	89.61%	93.08%	96.54%	100%	460,576,080	634,241,080	666,940,000	700,300,000	735,407,500	Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang	Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang selesai	750 Dokumen	750 Dokumen	750 Dokumen	750 Dokumen	750 Dokumen	88,193,040	228,958,040	97,250,000	103,000,000	107,500,000				
									Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW, RDTB, RTBL, dan RTRR lainnya	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW, RDTB, RTBL, dan RTRR lainnya selesai	2 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	282,900,000	741,960,000	260,000,000	485,000,000	485,000,000																
									Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang	Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat dalam bidang penataan ruang	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam bidang penataan ruang selesai	0 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	204,280,000	157,500,000	158,500,000	160,000,000																	
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang	Melaksanakan penyediaan data dan informasi melalui Sistem Informasi Penataan Ruang secara lengkap	Jumlah dokumen pelaporan data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang selesai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	204,650,000	151,580,000	225,650,000	237,000,000	248,800,000																
									Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	-	89.61%	93.08%	96.54%	100%	460,576,080	634,241,080	666,940,000	700,300,000	735,407,500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta selesai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	186,303,040	336,303,040	363,000,000	381,150,000	400,207,500		
Meningkatnya Terlibit administrasi pertanahan	Indeks Terlibit Administrasi Pertanahan	86.95%	92.73%	93.02%	93.31%	93.60%	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Meningkatkan penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	114,100,000	180,302,000	189,317,100	134,650,000	141,500,000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Pengendalian Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan	Melaksanakan penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta sesuai tatakala	Jumlah dokumen penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta selesai	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	114,100,000	180,302,000	189,317,100	134,650,000	141,500,000				
									PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kepala Bidang Pertanahan	Meningkatkan terlibit administrasi pemenuhan kebutuhan tanah	Persentase Terlibit Administrasi Pemenuhan Kebutuhan tanah	-	100%	100%	100%	100%	126,317,964	3,697,500,164	5,000,000,000	25,000,000,000	30,000,000,000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan	Melaksanakan proses koordinasi dan sinkronisasi pengaduan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengaduan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selesai	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	126,317,964	3,697,500,164	5,000,000,000	25,000,000,000	30,000,000,000	
									PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Kepala Bidang Pertanahan	Meningkatkan pendafaran pemanfaatan tanah aset Pemkot	Persentase Pendafaran Pemanfaatan Tanah Aset Pemkot	-	85.45%	86.03%	86.61%	87.20%	967,321,920	699,089,820	139,614,200	139,614,200	139,614,200	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kepala Seksi Penatausahaan Pertanahan	Melaksanakan inventarisasi tanah kosong di Kota Yogyakarta	Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	967,321,920	699,089,820	139,614,200	139,614,200	139,614,200	
									PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kepala Bidang Pertanahan	Meningkatkan kejelasan status penggunaan dan pemanfaatan tanah negara	Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP	-	100%	100%	100%	100%	64,904,000	78,613,040	71,600,000	75,200,000	78,960,000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan	Melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai tatakala	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta selesai	20 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	64,904,000	78,613,040	71,600,000	75,200,000	78,960,000	
									PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Kepala Bidang Pertanahan	Meningkatkan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-	81.22%	86.74%	88.95%	91.16%	1,246,910,000	1,213,742,000	1,139,576,500	1,201,076,500	1,263,476,500	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kepala Seksi Penatausahaan Pertanahan	Melaksanakan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat selesai	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1,005,550,000	898,081,000	808,076,500	853,076,500	898,076,500	
									Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Meningkatkan pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-	25%	50%	75%	100%	54,930,000	180,511,000	190,000,000	199,575,000	209,525,000	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan	Melaksanakan penyediaan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	241,360,000	315,661,000	331,500,000	348,000,000	365,400,000		
Meningkatnya reformasi indeks Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektat	AA Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	-	A	A	A	A	5,784,242,158	6,246,095,196	6,355,825,348	6,911,074,456	7,228,467,931	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	29 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	23,570,000	30,132,000	31,639,000	33,221,000	34,882,000			
									Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Meningkatkan pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-	25%	50%	75%	100%	54,930,000	180,511,000	190,000,000	199,575,000	209,525,000	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kepala Seksi Pengendalian Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan	Melaksanakan kegiatan pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai tatakala	Jumlah dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	105,750,000	111,500,000	117,075,000	122,900,000		
									Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Meningkatkan pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-	25%	50%	75%	100%	54,930,000	180,511,000	190,000,000	199,575,000	209,525,000	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kepala Seksi Pengendalian Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan	Melaksanakan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai tatakala	Jumlah dokumen penanganan keberatan dan sengketa pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai	1 Dokumen	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	54,930,000	74,761,000	78,500,000	82,500,000	86,625,000		





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

ꦏꦸꦢꦲꦤꦶꦠꦶꦩꦤꦢꦭꦱꦫꦠꦠꦱꦱꦤ

ꦏꦸꦏꦸꦩꦤꦶꦠꦶꦩꦤꦢꦭꦱꦫꦠꦠꦱꦱꦤ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682  
EMAIL: dirpertan@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Handoyo Hardjono Putro, S.T., M.A., M.T.P.

Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SUMADI, S.H., M.H.

Jabatan : Pj. Walikota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, 09 JAN 2023

Pihak Kedua  
  
SUMADI, S.H., M.H.  
NIP. 196308261989031007

Pihak Pertama  
  
Wahyu Handoyo HP, S.T., M.A., M.T.P.  
NIP. 197204111998031007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)  
KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	82,33
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	93,91
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	91

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 1.815.946.000	APBD 2023
2.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 248.507.000	APBD 2023
3.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp 1.789.443.000	APBD 2023
4.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp 673.139.000	APBD 2023
5.	Program Penatagunaan Tanah	Rp 81.512.000	APBD 2023
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Rp 1.095.017.000	DAIS 2023
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.790.097.900	APBD 2023
Jumlah Anggaran		Rp 11.493.661.900	

Yogyakarta, 09 JAN 2023

Pj. Walikota Yogyakarta  
  
**SUMADI, S.H., M.H.**  
 NIP. 196308261989031007

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
 (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)  
  
**Wahyu Handoyo HP, S.T., M.A., M.T.P.**  
 NIP. 197204111998031007



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

ดินแดนดินแดนดินแดนดินแดนดินแดน

จังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัด

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515665, 562582  
EMAIL: dinpertaru@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Handoyo Hardjono Putro, S.T., M.A., M.T.P.  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed.

Jabatan : Pj. Wali Kota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta,

01 NOV 2023



SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed.



Wahyu Handoyo HP, S.T., M.A., M.T.P.  
NIP. 197204111998031007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)  
KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	84,84
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	92,73
3.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 2.091.801.000	APBD Perubahan
2.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 145.722.000	APBD Perubahan
3.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp 1.567.496.000	APBD Perubahan
4.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp 532.811.500	APBD Perubahan
5.	Program Penatagunaan Tanah	Rp 166.673.000	APBD Perubahan
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Rp 904.594.000	DAIS Perubahan
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.283.515.400	APBD Perubahan
Jumlah Anggaran		Rp 11.692.612.900	

Yogyakarta,

01 NOV 2023

Pj. Wali Kota Yogyakarta



**SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed.**

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)



**Wahyu Handoyo HP, S.T., M.A., M.T.P.**  
NIP. 197204111998031007

**PENGUKURAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)**

No	Besaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan IV		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	84,54 Nilai	(50% Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang ditambah 50% Persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100	87,23% Nilai	102,82		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.081.801.000,00	2.081.629.830,00	98,58	
								PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.081.801.000,00	2.081.629.830,00	98,58	
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	92,73 Nilai	50% Persentase pendaftaran sertifikasi tanah aset Pemkot ditambah 50% Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah) dikali 100	93,74% Nilai	101,09		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	145.722.000,00	137.806.850,00	94,57	
								PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.587.496.000,00	1.543.314.940,00	98,46	
								PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	532.811.500,00	503.288.880,00	94,46	
								PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	188.673.000,00	163.840.280,00	98,18	
								PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	904.594.000,00	850.646.600,00	94,04	
								PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	904.594.000,00	850.646.600,00	94,04	
3.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	94,12% Nilai	104,58	Target A (>80 -90) Realisasi 94,12 (AA)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.283.515.400,00	5.996.589.881,00	95,43	

Faktor Pendorong:

Uraian Pemasalahan:

Rencana Tindak Lanjut:





**MATRIKS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2022  
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA )  
KOTA YOGYAKARTA**

No	Rekomendasi	Tindaklanjut	Bukti Dukung
1	Meningkatkan kinerja atau mengubah strategi agar target di sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan dapat terpenuhi	Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana ) Kota Yogyakarta telah melaksanakan perbaikan kinerja melalui penyesuaian target dan indikator kinerja baru tahun 2023-2026	Keputusan Walikota Yogyakarta No. 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
2	Menyesuaikan format pengukuran kinerja eselon IV/sub-Koordinator yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota yang berlaku	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana ) Kota Yogyakarta telah melaksanakan pengukuran kinerja eselon IV menggunakan format yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022	Pengukuran kinerja eselon IV sesuai dengan Peraturan Walikota No 9 Tahun 2022 pada TW I dan II
3	Meningkatkan pemantauan tindak lanjut terhadap rekomendasi terkait penyesuaian aktivitas secara berkala dalam laporan kinerja	Melaksanakan pemantauan tindak lanjut terhadap rekomendasi terkait penyesuaian aktivitas secara berkala dalam laporan kinerja	Monitoring dan tindak lanjut rekomendasi desk timbal balik evaluasi capaian kinerja
4	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan pedoman PermenPAN 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan pedoman PermenPAN 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Monitoring dan evaluasi kinerja internal berkala

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana )  
Kota Yogyakarta

DINAS  
PERTANAHAN DAN  
TATA RUANG

Wahyu Handoyo HP., ST., MA., MTP.  
NIP. 19720411 199803 1 007

**BERITA ACARA**  
**PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**  
**KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun 2023 telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2023 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

**MENYEPAKATI**

I. Hal-hal penting untuk dicermati

NO.	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Sudah menginputkan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah 2023 di sipd.kemendagri.go.id  APBD Murni 2023: Rp 11.493.661.900,00 Perubahan Renja 2023: Rp 63.493.661.900,00 Keterangan Perubahan (tuliskan secara ringkas, garis besar untuk alasan perubahan yang paling dominan): penambahan pengadaan tanah di 6 lokasi	YA	pengadaan tanah untuk Kantor Kemantren Ngampilan, Balai RW Kenekan, Makam Muja Muju, RTHP Prawirodirjan 1, Prawirodirjan 2, dan RTHP Prenggan
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasarkan pada Berita Acara terakhir.	YA	Sudah sesuai dengan Berita Acara Terakhir
3.	Perubahan Penjabaran APBD terakhir di masing-masing Perangkat Daerah menjadi bagian dari Perubahan Renja	YA	Sudah sesuai dengan Penjabaran APBD terakhir
4.	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2023 sampai dengan triwulan II	YA	Sudah menjadi bagian yang diperhitungkan
5.	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai target program / sasaran RPD	YA	Sudah disesuaikan dengan isu terkait bidang Pertanahan dan Tata Ruang
6.	Hasil revidi indikator dan target sasaran dan program perangkat daerah untuk Perubahan 2023 telah tertuang dalam file metadata di bit.ly/perencanaanjogjakota dan sudah disesuaikan di sipd.kemendagri.go.id	YA	Sudah sesuai pada file metadata dan disesuaikan pada SIPD
7.	Menyusun Narasi Renja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana Lampiran 2 Surat Edaran Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai tatakala	YA	Akan disesuaikan, sesuai tatakala paling lambat minggu ke 2 bulan Juli

**CATATAN:**

1. Anggaran Perubahan Renja tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 51.600.173.000,- dari APBD Murni 2023 sebesar Rp. 11.493.661.900,- menjadi Rp. 63.093.834.900,-
2. Perubahan Renja tahun 2023 mengalami kenaikan pada belanja, sebagai berikut :
  - Belanja Meja Kubikal sebesar Rp. 156.000.000,-
  - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 182.500.000,-
  - Penambahan Kategori untuk Hadiah dan Juri Lomba Hari Tata Ruang sebesar Rp. 45.400.000,-
  - Penyusunan Kajian Identifikasi Delineasi Kawasan RTBL Penjabaran RDTR sebesar Rp. 80.000.000,-
  - Penyusunan Kajian RTBL Kawasan Koridor Embung Budaya sebesar Rp. 100.000.000,-
  - Penyusunan Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kegiatan Reklame Pasca Penerapan Peraturan Pelaksanaan Rp. 75.000.000,-
  - Penyusunan Kajian Penentuan Indikator Prioritas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

NO.	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	sebesar Rp. 70.000.000,- • Penambahan Belanja Pengadaan Tanah di 6 lokasi : - Kantor Kemantren Ngampilan sebesar Rp. 32.280.000.000,- - Balai RW Kenekan sebesar Rp. 950.000.000,- - Makam Mujamuju sebesar Rp. 13.405.000.000,- - RTHP Prawirodirjan 1 sebesar Rp. 442.500.000,- - RTHP PRAWIRODIRJAN 2 sebesar Rp. 645.000.000,- - RTHP Prenggan sebesar Rp. 2.999.847.000,- • Penyusunan Kajian Identifikasi Kegiatan Pemanfaatan Tanah Negara sebesar Rp. 92.500.000,- 3. Terdapat juga pengurangan Belanja, diantaranya sebagai berikut : • Perjalanan Dinas dalam DIY dari 17 kali menjadi 6 kali. • Pengurangan Belanja BBM sebesar Rp. 20.880.000,- • Pengurangan Honor Tenaga Ahli pada Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang sebesar Rp. 30.000.000,- • Pengurangan Honor Pengamanan Tanah di Jalan Perwakilan sebesar Rp. 102.785.000,- • Pengurangan biaya Pensertifikatan dan biaya pembelian Patok 4. Untuk Pengadaan tanah pada Perubahan Renja 2023 agar dapat dipertimbangkan kembali, berdasarkan prioritas kebutuhan yang paling mendesak serta mengingat tatakala waktu yang efektif cukup singkat pada Anggaran Perubahan 2023.		

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Juni 2023

Pimpinan Sidang


Maria Herdwi Widyaningsih, S.T.

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Lucia Daning Krisnawati, S.IP, M.Si	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
2.	Ika Anggitasari	Inspektorat Daerah	
3.	Nindy Syafrilia	Bagian Tata Pemerintahan	
4.	Charina Permatasari	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
5.	Adi Widya Eka Pambudi, S.T.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
6.	Dwi Turistyosari	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
7.	Suprihatin	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	